



Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah

Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan isu publik yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata

kelola wilayah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta menjadi media berkembangnya penyakit.

Ringkasan Eksekutif

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah menunjukkan kemajuan pada aspek konsistensi kebijakan dan ketegasan pemerintah, tetapi belum optimal pada aspek sosialisasi, partisipasi masyarakat, kepatuhan warga, pemilahan sampah, dan ketersediaan fasilitas pengelolaan. Hambatan utama penelitian ini ialah belum adanya sistem pemilahan sampah yang efektif, terbatasnya sarana-prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan sosialisasi berbasis desa, penyediaan infrastruktur dasar pengelolaan sampah, serta peningkatan kepatuhan masyarakat melalui pengawasan dan kolaborasi kelembagaan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, serta memperkuat partisipasi masyarakat.

Namun, penelitian di Kecamatan Amuntai Tengah menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada efektivitas implementasi di tingkat lokal.

Masalah Kebijakan

Terdapat tiga masalah utama dalam implementasi kebijakan ini. Pertama, belum tersedia sistem pemilahan sampah yang berjalan efektif sehingga sampah sulit didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Kedua, fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas, baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan teknis. Ketiga, tingkat kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat masih rendah karena sosialisasi kebijakan belum menjangkau warga secara luas dan merata.

Temuan Utama

1. Sosialisasi kebijakan belum optimal

Penyebaran informasi mengenai Perda pengelolaan sampah belum menjangkau seluruh warga secara merata. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memahami secara

Penulis	: Ahmad Baihaqi
Penanggung jawab	: Gusti M.Hidayatullah
Kedaktur	: M.Rifky Fuadi
Editor	: Meldy Al-Fitri
Desain Grafis	: Meldy Al-Fitri
Sekretariat	: PPPM STIA Amuntai
Email	: stiaamuntai.ac.id

operasional kewajiban dan tata cara pengelolaan sampah.

2. Isi kebijakan relatif kuat

Dari sisi isi, kebijakan dinilai telah menunjukkan konsistensi dan ketegasan. Akan tetapi, kekuatan regulasi ini belum sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku warga karena dukungan implementasi masih lemah.

3. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat masih rendah

Keterlibatan warga dalam pemilahan, pembuangan, dan pengawasan sampah belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada perubahan perilaku sosial di tingkat komunitas.

4. Pembagian potensi belum sinergis

Pemerintah telah berupaya mendorong pengembangan potensi masyarakat, tetapi dukungan masyarakat sendiri masih terbatas. Hubungan kerja antara pemerintah desa, dinas terkait, dan warga belum berjalan sebagai sistem kolaboratif yang kuat.

5. Hambatan utama bersifat struktural dan perilaku

Hambatan paling menonjol adalah tidak adanya sistem pemilahan sampah, kurangnya fasilitas pengelolaan, rendahnya kesadaran warga, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan anggaran.

Implikasi Kebijakan

Pertama, keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin perubahan di lapangan. Tanpa sistem sosialisasi yang luas dan berulang, masyarakat tidak akan memiliki pemahaman operasional terhadap kewajiban mereka.

Kedua, implementasi kebijakan lingkungan memerlukan dukungan infrastruktur dasar.

Tanpa fasilitas pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan, masyarakat cenderung kembali pada praktik lama yang tidak tertib.

Ketiga, pengelolaan sampah adalah isu tata kelola kolaboratif. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada hubungan kerja yang efektif antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat.

Opsi Kebijakan

Opsi 1. Memperluas sosialisasi kebijakan secara berkala di seluruh desa

Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan pemerintah desa menyelenggarakan sosialisasi rutin dengan materi sederhana tentang pemilahan, pembuangan, dan pengawasan sampah rumah tangga.

Kelebihan: relatif mudah dijalankan dan cepat meningkatkan pengetahuan publik.
Kelemahan: dampaknya terbatas bila tidak disertai fasilitas dan pengawasan.

Opsi 2. Memperkuat sarana-prasarana pengelolaan sampah di tingkat desa

Intervensi diarahkan pada penyediaan tempat sampah terpilah, titik pengumpulan, sarana angkut, dan dukungan teknis pengelolaan.

Kelebihan: menyentuh akar masalah struktural.
Kelemahan: memerlukan dukungan anggaran dan koordinasi lintas unit.

Opsi 3. Menerapkan model kolaboratif pemerintah-desa-masyarakat

Pemerintah kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan warga membangun mekanisme pengelolaan sampah berbasis komunitas, termasuk pengawasan, pembagian peran, dan dorongan kepatuhan.

Kelebihan: meningkatkan kepemilikan sosial terhadap kebijakan.
Kelemahan: membutuhkan waktu, kepemimpinan lokal, dan komitmen kolektif.

Rekomendasi Kebijakan

1. Memprioritaskan sosialisasi berbasis desa secara intensif dan berulang dengan melibatkan pemerintah desa, RT/RW, tokoh masyarakat, dan kelompok warga.
2. Membangun sistem pemilahan sampah dan fasilitas dasar pengelolaan, termasuk tempat sampah terpilah, titik pengumpulan, dan pengaturan alur pengangkutan.
3. Memperkuat kepatuhan masyarakat melalui pengawasan desa, pendekatan partisipatif, serta pembagian peran yang lebih jelas antara dinas, kecamatan, desa, dan warga.
4. Mengintegrasikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan forum koordinasi lokal agar implementasi kebijakan tidak berhenti pada level administratif.

Langkah Implementasi Jangka Pendek

- Memetakan desa dan titik rawan sampah yang perlu diprioritaskan.
- Menyusun jadwal sosialisasi desa per desa secara berkala.
- Menyediakan sarana pemilahan sederhana di lokasi strategis.
- Membentuk forum koordinasi desa untuk pengawasan dan evaluasi pengelolaan sampah.

Indikator Keberhasilan

No.	Indikator
1	Meningkatnya cakupan sosialisasi di seluruh desa sasaran.

No.	Indikator
2	Tersedianya fasilitas pemilahan dan pengumpulan sampah dasar.
3	Menurunnya praktik pembuangan sampah sembarangan.
4	Meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah.
5	Meningkatnya tingkat kepatuhan warga terhadap ketentuan Perda.

Penutup

Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2013 di Kecamatan Amuntai Tengah belum gagal, tetapi juga belum efektif sepenuhnya. Regulasi dan komitmen pemerintah sudah tersedia, namun hasil kebijakan masih tertahan oleh lemahnya sosialisasi, terbatasnya fasilitas, dan rendahnya dukungan masyarakat. Karena itu, arah pembenahan kebijakan harus difokuskan pada penguatan implementasi, bukan sekadar penegasan aturan.

Sumber Dasar

Dokumen ini disusun berdasarkan artikel penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi kasus: Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang dan Kota Raden Hulu)".